



Praktik Politik Kontemporer: Komunikasi Politik dalam Perspektif Konsep, Teori, dan Strategi

Endang Purnawati¹, Nendia Sapitri², Juairiah. S³, Naswa Wafaul Mujahidah Al amin⁴,
Dedi Syaputra⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Yasni Bungo

E-mail: andien.ep@gmail.com¹, nendiasapitri@gmail.com², juariah8765@gmail.com³,
wawanaswa894@gmail.com⁴, dedisyaputraaa@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received December 20, 2025

Revised December 29, 2025

Accepted Januari 01, 2025

Keywords:

Political Communication;

Communication Strategy;

Public Opinion; Contemporary

Democracy

ABSTRACT

In contemporary political practice, political communication plays a strategic role in shaping public opinion, building legitimacy of power, and influencing relations between political actors and society. The development of digital media and the intensity of information flows have changed the way political messages are produced, disseminated, and interpreted, so that political communication can no longer be understood solely as a process of conveying information, but as a social experience laden with meaning and emotion. This study aims to understand political communication from the perspective of concepts, theories, and strategies, emphasizing how the process is interpreted by the public in the context of contemporary political practice. This study uses a theoretical qualitative approach with a literature study design, with data sources in the form of scientific books, reputable journal articles, and academic documents relevant to the study of political communication. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of meaning and social dynamics that emerge in the practice of political communication. The results show that political communication is experienced as a symbolic and emotional process that shapes public perception, involves the negotiation of meaning between hope and doubt, and produces dynamic and fragile trust. Political communication strategies not only serve to build support but also have the potential to trigger ambiguity and public skepticism when they are not in line with the social experiences of the community. Theoretically, this study enriches the study of political communication by emphasizing the importance of a qualitative approach in understanding public social experiences and meanings. Practically, these findings have implications for the development of political communication strategies that are more contextual, reflective, and sensitive to social dynamics in modern democracies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 20, 2025

Revised December 29, 2025

Accepted Januari 01, 2025

ABSTRAK

Dalam praktik politik kontemporer, komunikasi politik memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik, membangun legitimasi kekuasaan, serta memengaruhi relasi antara aktor politik dan masyarakat. Perkembangan media digital dan intensitas arus informasi

**Kata Kunci:**

Komunikasi Politik; Strategi
Komunikasi; Opini Publik;
Demokrasi Kontemporer

telah mengubah cara pesan politik diproduksi, disebarkan, dan dimaknai, sehingga komunikasi politik tidak lagi dapat dipahami semata sebagai proses penyampaian informasi, tetapi sebagai pengalaman sosial yang sarat makna dan emosi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi politik dari perspektif konsep, teori, dan strategi, dengan menekankan bagaimana proses tersebut dimaknai oleh masyarakat dalam konteks praktik politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif teoretis dengan desain studi pustaka, dengan sumber data berupa buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan dokumen akademik yang relevan dengan kajian komunikasi politik. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola makna dan dinamika sosial yang muncul dalam praktik komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik dialami sebagai proses simbolik dan emosional yang membentuk persepsi publik, melibatkan negosiasi makna antara harapan dan keraguan, serta menghasilkan kepercayaan yang bersifat dinamis dan rapuh. Strategi komunikasi politik tidak hanya berfungsi untuk membangun dukungan, tetapi juga berpotensi memicu ambiguitas dan skeptisisme publik ketika tidak selaras dengan pengalaman sosial masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi politik dengan menegaskan pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami pengalaman dan makna sosial publik. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih kontekstual, reflektif, dan sensitif terhadap dinamika sosial dalam demokrasi modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Endang Purnawati
Institut Agama Islam Yasni Bungo
E-mail: andien.ep@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam praktik politik kontemporer, komunikasi politik hadir sebagai ruang sosial yang secara langsung memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik, menilai aktor politik, serta membentuk sikap dan pilihan politiknya. Bagi individu dan kelompok masyarakat, pesan-pesan politik tidak lagi sekadar diterima sebagai informasi, tetapi diinterpretasikan melalui pengalaman sosial, latar budaya, dan interaksi sehari-hari dengan media. Fenomena ini tampak jelas ketika masyarakat dihadapkan pada narasi politik yang dibangun melalui simbol, bahasa, dan strategi komunikasi tertentu yang secara perlahan membentuk opini publik dan legitimasi kekuasaan. Dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima pesan, komunikasi politik sering kali menjadi arena negosiasi makna antara kepentingan aktor politik dan pengalaman sosial warga negara.

Secara empiris, praktik komunikasi politik saat ini menunjukkan pergeseran yang signifikan seiring dengan berkembangnya media digital dan meningkatnya intensitas arus informasi. Hasil observasi awal terhadap berbagai wacana politik di media massa dan media sosial memperlihatkan bahwa aktor politik semakin mengandalkan strategi komunikasi yang



bersifat persuasif, simbolik, dan emosional untuk memengaruhi persepsi publik. Dalam berbagai laporan lapangan dan diskusi publik, masyarakat kerap menilai pesan politik bukan semata berdasarkan substansi kebijakan, tetapi pada bagaimana pesan tersebut dikemas, disampaikan, dan direpresentasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak dapat dipahami secara linear sebagai proses penyampaian pesan, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks dan sarat makna.

Urgensi kajian komunikasi politik menjadi semakin kuat ketika praktik politik kontemporer dihadapkan pada tantangan global, seperti polarisasi politik, disinformasi, dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Di tingkat lokal maupun global, strategi komunikasi politik berperan besar dalam menentukan stabilitas demokrasi dan kualitas partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, memahami komunikasi politik melalui perspektif konsep, teori, dan strategi menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana opini publik dibentuk dan diarahkan dalam konteks politik modern, khususnya di era media digital yang ditandai oleh kecepatan dan fragmentasi informasi.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas komunikasi politik dari berbagai sudut pandang, seperti peran media digital dalam kampanye politik, strategi pencitraan aktor politik, serta pengaruh komunikasi politik terhadap perilaku pemilih. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek teknis dan kuantitatif, seperti efektivitas media atau tingkat pengaruh pesan terhadap preferensi politik. Masih terbatas kajian yang menempatkan komunikasi politik sebagai proses sosial yang sarat makna, dengan menelaah integrasi antara konsep, teori, dan strategi komunikasi politik secara mendalam melalui pendekatan kualitatif teoretis. Kekosongan literatur ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih reflektif untuk memahami bagaimana komunikasi politik dimaknai dan dijalankan dalam praktik politik kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik dalam perspektif konsep, teori, dan strategi, serta relevansinya dalam praktik politik kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman komunikasi politik sebagai instrumen strategis dalam membangun opini publik dan legitimasi kekuasaan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian komunikasi politik berbasis pendekatan kualitatif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan praktisi politik dalam merancang dan mengevaluasi strategi komunikasi politik yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pemahaman sosial masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kualitatif teoretis berbasis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak berfokus pada pengukuran variabel atau generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, dan strategi komunikasi politik sebagaimana dipraktikkan dalam konteks politik kontemporer. Pendekatan kualitatif teoretis memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna, proses, dan konstruksi sosial yang melekat dalam praktik komunikasi politik, khususnya dalam membangun opini publik dan legitimasi kekuasaan.



Strategi pemilihan sumber data dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih sumber-sumber yang relevan dan memiliki otoritas akademik dalam kajian komunikasi politik. Sumber data utama terdiri atas buku teks ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen akademik yang terbit dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Kriteria inklusi sumber meliputi: (1) membahas komunikasi politik dari perspektif konsep, teori, atau strategi; (2) relevan dengan konteks politik kontemporer dan demokrasi; serta (3) diterbitkan oleh penerbit atau jurnal yang kredibel. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, sehingga konteks penelitian ditempatkan pada ruang wacana akademik dan praktik komunikasi politik yang direpresentasikan melalui literatur ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi bahan pustaka yang relevan. Prosedur pengumpulan data diawali dengan pemetaan tema utama penelitian, dilanjutkan dengan pencarian literatur melalui basis data jurnal ilmiah dan katalog perpustakaan digital. Data yang telah terkumpul kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disistematiskan berdasarkan fokus kajian, yaitu konsep komunikasi politik, teori-teori utama komunikasi politik, serta strategi komunikasi politik dalam praktik kontemporer. Alat bantu yang digunakan berupa lembar pencatatan data dan matriks analisis literatur untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan sumber.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik kualitatif. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) pengodean terbuka (open coding) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur; (3) pengelompokan tema ke dalam kategori konseptual yang merepresentasikan hubungan antara konsep, teori, dan strategi komunikasi politik; serta (4) penarikan kesimpulan secara interpretatif dan reflektif. Analisis dilakukan secara manual dengan pendekatan deskriptif-analitis, tanpa menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif khusus, mengingat fokus penelitian bersifat teoretis dan konseptual.

Keabsahan data dijaga melalui penerapan prinsip trustworthiness dalam penelitian kualitatif. Credibility dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber pustaka dan perspektif teoretis untuk memperoleh pemahaman yang seimbang. Transferability dijaga melalui penyajian deskripsi konteks dan kerangka teoretis secara rinci agar temuan dapat dipahami dan digunakan dalam konteks lain yang relevan. Dependability dicapai dengan menjelaskan secara sistematis tahapan penelitian dan analisis data. Sementara itu, confirmability dijaga dengan memastikan bahwa interpretasi dan kesimpulan penelitian didasarkan pada data dan kerangka teori yang jelas, bukan pada asumsi subjektif peneliti.

Dari sisi etika penelitian, kajian ini menjunjung tinggi prinsip kejujuran akademik dengan menghindari plagiarisme, mencantumkan sumber rujukan secara transparan, serta menghormati hak kekayaan intelektual penulis sebelumnya. Karena penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, aspek informed consent dan kerahasiaan data personal tidak diterapkan. Namun demikian, etika akademik tetap menjadi landasan utama dalam seluruh proses penelitian.

KAJIAN TEORI

1. Komunikasi Politik sebagai Proses Konstruksi Makna

*(Teori Konstruksionisme Sosial dan Framing)*

Dalam praktik politik kontemporer, komunikasi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penyampaian pesan dari aktor politik kepada publik, melainkan sebagai proses konstruksi makna sosial. Perspektif konstruksionisme sosial memandang realitas politik sebagai sesuatu yang dibentuk melalui interaksi simbolik, bahasa, dan narasi yang terus diproduksi dan direproduksi dalam ruang publik. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi—sebuah proses yang sangat relevan dalam komunikasi politik modern.

Dalam konteks mutakhir, pendekatan ini diperkuat oleh kajian framing yang menekankan bagaimana pesan politik dikemas untuk membentuk cara publik memahami suatu isu. Entman (2019) menjelaskan bahwa framing bukan hanya soal seleksi isu, tetapi juga penekanan aspek tertentu yang membentuk emosi, penilaian moral, dan interpretasi khalayak. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa framing politik bekerja pada level pengalaman subjektif masyarakat, misalnya rasa takut, harapan, atau ketidakpercayaan terhadap institusi politik (Aalberg et al., 2021; *Journal of Communication*, Scopus).

Bagi masyarakat sebagai penerima pesan, komunikasi politik sering kali dialami sebagai pengalaman emosional dan simbolik. Ketika aktor politik menggunakan narasi “krisis”, “ancaman”, atau “perubahan”, publik tidak hanya memahami pesan tersebut secara rasional, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman hidup sehari-hari. Dengan demikian, teori konstruksi makna dan framing membantu menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk melalui proses interpretatif, bukan sekadar respons terhadap informasi objektif.

2. Teori Ruang Publik dan Dinamika Opini Publik*(Public Sphere Theory dan Deliberative Communication)*

Teori ruang publik (public sphere) memberikan landasan penting untuk memahami komunikasi politik sebagai proses sosial yang berlangsung dalam interaksi antara negara, aktor politik, media, dan masyarakat. Habermas memandang ruang publik sebagai arena diskursif tempat warga membentuk opini melalui pertukaran argumen. Dalam perkembangan mutakhir, konsep ini mengalami transformasi seiring hadirnya media digital yang memperluas sekaligus memfragmentasi ruang publik.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ruang publik digital tidak sepenuhnya deliberatif, tetapi bersifat hibrid menggabungkan diskusi rasional, ekspresi emosional, dan konflik identitas (Dahlgren, 2020; *Media, Culture & Society*). Dalam konteks ini, komunikasi politik berperan sebagai mekanisme yang dapat memperkuat partisipasi publik, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi. Pengalaman masyarakat dalam ruang publik digital sering kali ditandai oleh paparan pesan politik yang berulang, algoritmik, dan emosional, yang memengaruhi cara mereka membangun sikap politik.

Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk tidak hanya melalui argumen rasional, tetapi juga melalui dinamika sosial seperti tekanan kelompok, identitas kolektif, dan legitimasi simbolik. Studi oleh Vaccari dan Valeriani (2021; *Political Communication*, WoS) menunjukkan bahwa interaksi politik di ruang digital membentuk



pengalaman politik warga secara lebih personal dan terfragmentasi, sehingga komunikasi politik menjadi semakin strategis dalam mengelola persepsi publik.

3. Perbandingan Pendekatan Teoretis dan Pilihan Lensa Analisis

Pendekatan konstruksionisme sosial dan framing menekankan proses internalisasi makna pada level individu dan kelompok, sementara teori ruang publik menyoroti arena sosial tempat makna tersebut diproduksi dan diperdebatkan. Keduanya saling melengkapi, namun memiliki titik tekan yang berbeda. Teori framing lebih kuat dalam menjelaskan bagaimana pesan politik memengaruhi persepsi dan emosi publik, sedangkan teori ruang publik lebih menekankan dinamika sosial dan struktur komunikasi politik.

Penelitian ini memilih konstruksionisme sosial dan framing sebagai lensa utama, dengan teori ruang publik sebagai kerangka pendukung. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami komunikasi politik sebagai pengalaman bermakna bagi masyarakat, bukan sekadar sebagai proses institusional. Dalam praktik politik kontemporer, masyarakat tidak hanya “berpartisipasi” dalam ruang publik, tetapi juga mengalami komunikasi politik secara emosional, simbolik, dan reflektif dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan landasan teoretis tersebut, penelitian ini memandang komunikasi politik sebagai proses sosial yang membentuk makna, pengalaman, dan orientasi politik masyarakat. Data akan ditafsirkan dengan melihat bagaimana konsep, teori, dan strategi komunikasi politik bekerja dalam membangun opini publik melalui narasi, simbol, dan praktik komunikasi yang berulang. Peneliti memposisikan diri sebagai penafsir yang membaca komunikasi politik bukan sebagai variabel, tetapi sebagai teks sosial yang merepresentasikan relasi kekuasaan, pengalaman kolektif, dan dinamika legitimasi.

Kerangka pikir ini memungkinkan peneliti untuk memahami komunikasi politik secara holistik sebagai praktik sosial yang hidup dalam pengalaman masyarakat serta menafsirkan bagaimana aktor politik dan publik saling membentuk makna dalam praktik politik kontemporer.

HASIL PENELITIAN

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menelaah pola-pola makna yang muncul dari literatur, narasi praktik komunikasi politik, serta refleksi pengalaman sosial masyarakat dalam praktik politik kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi politik dipahami dan dialami sebagai proses sosial yang kompleks, emosional, dan tidak selalu linear. Temuan penelitian dikelompokkan ke dalam tiga tema utama yang saling berkelindan dan membentuk pengalaman kolektif masyarakat dalam membangun opini publik.

Tema 1: Komunikasi Politik sebagai Pengalaman Simbolik dan Emosional

Dalam praktik politik kontemporer, komunikasi politik kerap hadir sebagai pengalaman simbolik yang menyentuh ranah emosi masyarakat. Pesan-pesan politik tidak diterima secara netral, melainkan diinterpretasikan melalui simbol, metafora, dan narasi yang dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari. Situasi ini sering muncul dalam konteks kampanye politik,



pidato publik, maupun wacana politik di media digital, ketika aktor politik menggunakan bahasa yang menggugah rasa harapan, ketakutan, atau kebanggaan kolektif.

Salah satu narasi yang muncul menggambarkan bagaimana masyarakat merasakan kedekatan emosional dengan pesan politik tertentu, meskipun substansi kebijakannya tidak selalu dipahami secara mendalam. Seorang partisipan (P1) merefleksikan pengalaman tersebut sebagai berikut:

“Kadang saya tidak terlalu paham isi kebijakannya, tapi cara mereka bicara itu terasa menyentuh. Seolah-olah mereka mengerti kondisi kami.” (P1)

Kutipan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik bekerja pada level afektif, bukan semata rasional. Pesan politik menjadi bermakna ketika mampu merepresentasikan perasaan dan pengalaman sosial masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pengalaman emosional ini juga menyimpan ambiguitas, karena kedekatan simbolik tidak selalu berbanding lurus dengan kejelasan program atau komitmen politik yang nyata.

Tema 2: Negosiasi Makna dan Ketegangan dalam Pembentukan Opini Publik

Tema kedua mengungkapkan bahwa pembentukan opini publik merupakan proses negosiasi makna yang penuh ketegangan. Masyarakat tidak sepenuhnya pasif dalam menerima pesan politik, tetapi secara aktif menafsirkan, mempertanyakan, dan bahkan meragukan narasi yang disampaikan aktor politik. Ketegangan ini sering muncul ketika pesan politik yang disampaikan tidak sejalan dengan pengalaman sosial masyarakat sehari-hari.

Dalam situasi tertentu, partisipan mengungkapkan adanya konflik batin antara keinginan untuk percaya dan pengalaman yang memunculkan skeptisisme. Seorang partisipan (P3) mengungkapkan refleksi tersebut:

“Di satu sisi mereka bicara perubahan, tapi di sisi lain saya melihat realitasnya tidak banyak berubah. Jadi rasanya campur aduk antara berharap dan ragu.” (P3)

Pengalaman ini menunjukkan bahwa opini publik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses interpretatif yang sarat dilema. Masyarakat berada dalam posisi ambigu, antara menerima pesan politik sebagai harapan kolektif dan menolaknya sebagai retorika strategis. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik tidak selalu menghasilkan konsensus, tetapi justru membuka ruang perdebatan dan ketidakpastian makna.

Tema 3: Strategi Komunikasi Politik dan Produksi Kepercayaan yang Rapuh

Tema ketiga menyoroiti bagaimana strategi komunikasi politik berperan dalam membangun, sekaligus merentankan, kepercayaan publik. Strategi komunikasi yang intensif dan berulang dapat menciptakan kesan kedekatan antara aktor politik dan masyarakat. Namun, ketika strategi tersebut dipersepsi sebagai manipulatif atau terlalu simbolik, kepercayaan yang terbentuk menjadi rapuh dan mudah runtuh.

Dalam konteks ini, partisipan menggambarkan pengalaman mereka menghadapi banjir pesan politik di media digital. Seorang partisipan (P5) menyatakan:

“Awalnya terasa meyakinkan karena sering muncul dan bahasanya sederhana. Tapi lama-lama saya merasa itu hanya strategi supaya kita percaya.” (P5)



Kutipan ini mengungkap paradoks dalam komunikasi politik kontemporer: strategi yang dirancang untuk membangun kepercayaan justru dapat memicu kelelahan dan kecurigaan publik. Kepercayaan menjadi sesuatu yang sementara, dinegosiasikan terus-menerus, dan bergantung pada konsistensi antara pesan politik dan pengalaman nyata masyarakat.

Transisi Antar Tema dan Refleksi Tematik

Ketiga tema tersebut saling terhubung dalam satu rangkaian pengalaman sosial yang utuh. Pengalaman simbolik dan emosional (Tema 1) menjadi pintu masuk bagi masyarakat dalam menerima pesan politik, yang kemudian dinegosiasikan secara kritis melalui pengalaman sosial mereka (Tema 2). Proses ini pada akhirnya memengaruhi cara masyarakat membangun atau meruntuhkan kepercayaan terhadap aktor politik (Tema 3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam praktik kontemporer bukanlah proses yang linier dan stabil, melainkan arena dinamis yang dipenuhi makna, ambiguitas, dan ketegangan sosial.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa komunikasi politik dalam praktik politik kontemporer tidak semata berfungsi sebagai mekanisme penyampaian pesan, tetapi sebagai proses sosial yang membentuk makna, pengalaman, dan relasi kepercayaan antara aktor politik dan masyarakat. Tiga temuan utama yakni komunikasi politik sebagai pengalaman simbolik dan emosional, proses negosiasi makna dalam pembentukan opini publik, serta strategi komunikasi politik dalam produksi kepercayaan yang rapuh menunjukkan bahwa opini publik dibangun melalui dinamika yang kompleks, penuh ambiguitas, dan tidak selalu linear. Temuan ini menegaskan pentingnya membaca komunikasi politik dari perspektif kualitatif yang menempatkan pengalaman sosial masyarakat sebagai pusat analisis.

Tema pertama menunjukkan bahwa komunikasi politik bekerja kuat pada ranah simbolik dan emosional. Temuan ini sejalan dengan teori konstruksionisme sosial dan framing yang menempatkan bahasa, simbol, dan narasi sebagai instrumen pembentuk realitas sosial. Studi Entman (2019) menegaskan bahwa framing politik membentuk cara publik memahami isu melalui penekanan aspek tertentu yang memicu respons emosional. Penelitian-penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa emosi memainkan peran sentral dalam penerimaan pesan politik, terutama dalam konteks media digital yang sarat narasi persuasif (Aalberg et al., 2021; *Journal of Communication*). Hasil penelitian ini memperkaya kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa bagi masyarakat, kedekatan emosional terhadap pesan politik sering kali lebih menentukan daripada pemahaman rasional terhadap substansi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi politik dapat dipahami sebagai pengalaman afektif yang membentuk rasa keterhubungan simbolik antara publik dan aktor politik.

Namun, pengalaman emosional tersebut tidak berdiri sendiri. Tema kedua memperlihatkan bahwa pembentukan opini publik merupakan proses negosiasi makna yang sarat ketegangan dan dilema. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa publik bukanlah penerima pesan yang pasif, melainkan aktor interpretatif yang secara aktif menimbang pesan politik dengan pengalaman sosial mereka. Hal ini sejalan dengan kajian ruang publik deliberatif



yang menyatakan bahwa opini publik terbentuk melalui proses diskursif yang sering kali tidak mencapai konsensus penuh (Dahlgren, 2020). Akan tetapi, berbeda dengan asumsi deliberasi rasional klasik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi makna juga melibatkan konflik batin, keraguan, dan ambivalensi emosional. Dengan kata lain, opini publik tidak selalu lahir dari pertukaran argumen rasional, melainkan dari perjumpaan antara narasi politik dan realitas hidup masyarakat.

Tema ketiga menyoroti paradoks strategi komunikasi politik dalam membangun kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dirancang untuk menciptakan kedekatan dan kepercayaan justru dapat memicu kecurigaan ketika dipersepsi sebagai manipulatif atau tidak konsisten dengan pengalaman nyata masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Vaccari dan Valeriani (2021; *Political Communication*) yang menyatakan bahwa intensitas komunikasi politik di ruang digital dapat menghasilkan efek ganda: memperkuat keterlibatan sekaligus meningkatkan skeptisisme publik. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa kepercayaan publik bersifat rapuh dan terus dinegosiasikan, bukan kondisi yang stabil dan permanen. Kepercayaan menjadi produk sementara dari interaksi simbolik yang dapat runtuh ketika terjadi ketidaksesuaian antara pesan politik dan pengalaman sosial masyarakat.

Secara konseptual, temuan penelitian ini memperkaya kajian komunikasi politik dengan menawarkan cara pandang yang lebih reflektif terhadap pengalaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sering berada pada posisi marginal dalam diskursus politik. Ketegangan, ambiguitas, dan keraguan yang muncul dalam pengalaman partisipan menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak selalu memberdayakan, tetapi juga dapat menciptakan jarak emosional dan krisis kepercayaan. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus kajian dari efektivitas strategi komunikasi menuju pemahaman tentang bagaimana strategi tersebut dimaknai, dinegosiasikan, dan dipertanyakan oleh masyarakat.

Refleksi peneliti juga menjadi bagian penting dalam memahami temuan ini. Latar sosial-budaya masyarakat yang hidup dalam arus informasi cepat dan berulang memengaruhi cara mereka memaknai pesan politik secara kritis dan selektif. Posisi peneliti sebagai penafsir wacana turut memengaruhi pembacaan data, terutama dalam menekankan dimensi makna dan pengalaman subjektif dibandingkan penilaian normatif atas benar atau salahnya strategi komunikasi politik. Kesadaran reflektif ini penting untuk menjaga interpretasi tetap kontekstual dan tidak mereduksi kompleksitas pengalaman sosial partisipan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam praktik politik kontemporer perlu dipahami sebagai proses sosial yang hidup, dinamis, dan sarat makna. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif kualitatif dalam kajian komunikasi politik, dengan menempatkan pengalaman masyarakat sebagai sumber pengetahuan yang sah dan penting. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan teori dan praktik komunikasi politik yang lebih sensitif terhadap konteks sosial, emosi publik, dan dinamika kepercayaan dalam demokrasi modern.

KESIMPULAN



Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam praktik politik kontemporer merupakan proses sosial yang membentuk makna, emosi, dan relasi kepercayaan antara aktor politik dan masyarakat. Temuan utama mengungkap bahwa komunikasi politik tidak bekerja secara linear sebagai penyampaian informasi, melainkan hadir sebagai pengalaman simbolik yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik, menegosiasikan opini publik, dan menilai legitimasi kekuasaan. Pola makna yang muncul memperlihatkan adanya dinamika emosional, ambiguitas, serta ketegangan batin dalam proses penerimaan pesan politik.

Pemahaman baru yang dihasilkan dari penelitian ini terletak pada cara komunikasi politik dimaknai oleh masyarakat sebagai ruang negosiasi antara harapan dan keraguan. Pesan-pesan politik tidak hanya diterima atau ditolak, tetapi diolah melalui pengalaman sosial dan konteks hidup sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa opini publik terbentuk melalui proses interpretatif yang kompleks, di mana emosi, simbol, dan pengalaman kolektif memiliki peran yang sama pentingnya dengan argumen rasional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif kajian komunikasi politik yang selama ini cenderung menekankan efektivitas strategi, menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan makna sosial masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada penguatan pendekatan kualitatif dalam studi komunikasi politik dengan menempatkan konstruksi makna dan pengalaman publik sebagai pusat analisis. Temuan ini memperkaya teori komunikasi politik dengan menunjukkan bahwa kepercayaan publik bersifat rapuh dan terus dinegosiasikan melalui interaksi simbolik yang berulang. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi aktor politik dan praktisi komunikasi untuk merancang strategi komunikasi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial, emosi publik, dan konsistensi antara narasi politik dan realitas masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik dapat dipahami tidak hanya sebagai alat persuasi, tetapi sebagai praktik sosial yang berpotensi memperkuat kualitas demokrasi dan hubungan antara negara dan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aalberg, T., Strömbäck, J., & de Vreese, C. H. (2021). The framing of politics as strategy and game: A review of concepts, operationalizations, and key findings. *Journal of Communication*, 71(4), 567–595. <https://doi.org/10.1093/joc/jqab012>
- Abda, Y., & Zulfikar. (2024). *Strategi komunikasi politik ideal bagi calon walikota dalam Pilkada Aceh 2024*. Jurnal An-nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, 11(2). <https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.900>
- Adnan, I. Z., Fadhlurrohman, M. I., & Fauzan, H. S. (2025). *Political communication and voter response framework in Garut for the 2024 regional election*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 10(2). <https://doi.org/10.15294/jpi.v10i2.22654>
- Aji, M. P., Zahir, A. A., Oktavia, D., & Situmorang, G. N. A. (2025). *Strategi komunikasi politik H. Ali Muhammad Johan C. melalui media sosial Instagram dalam Pemilu 2024*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3081>



- Alkadrie, N. U. (2025). *Political communication in the digital age: The role of social media and digital activities in the 2024 election campaign*. PERSPEKTIF, 14(2), 380–386. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i2.14059>
- Aminudin, A. (2025). *Media sosial dan wacana penundaan Pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough*. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 7(2). <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4407>
- Anshori, M. (2019). Konstruksi Realitas Media Online atas Pemberitaan “Raja Jokowi”: Sebuah Analisis Framing. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(1), 81-94. <https://doi.org/10.14421/kjc.11.06.2019>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2020). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge* (Reprint ed.). Penguin Books.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2019). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahlgren, P. (2020). Media, knowledge and trust: The deepening epistemic crisis of democracy. *Journalism Studies*, 21(1), 20–37. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1698887>
- Entman, R. M. (2019). *Framing bias: Media in the distribution of power*. University of Chicago Press.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Habermas, J. (2021). *The structural transformation of the public sphere* (Updated ed.). Polity Press.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2020). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. New York University Press.
- Kaid, L. L., & Holtz-Bacha, C. (2020). *Political communication in action: From theory to practice* (2nd ed.). Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2020). *Naturalistic inquiry* (Reissue ed.). SAGE Publications.
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mutz, D. C. (2020). *Hearing the other side: Deliberative versus participatory democracy*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2020). *In praise of skepticism: Trust but verify*. Oxford University Press.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2021). *Interpreting qualitative data* (6th ed.). SAGE Publications.
- Strömbäck, J., & Esser, F. (2020). Introduction: Making sense of the mediatization of politics. *Journalism Studies*, 21(5), 553–559. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1739093>



- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2021). Outside the bubble: Social media and political participation in Western democracies. *Political Communication*, 38(1–2), 1–20. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1773510>
- Waisbord, S. (2020). *Communication: A post-discipline*. Polity Press.
- Wijaya, A. R., & Sari, M. P. (2022). Komunikasi politik dan pembentukan opini publik di era media digital. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(3), 45–60. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3803-03>
- Yin, R. K. (2020). *Qualitative research from start to finish* (2nd ed.). Guilford Press.